

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN

Dyah Novitasari

dyahnovitasari27@gmail.com

Lailatul Amanah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the effect of accountability public transparency and supervision on budget performance of Surabaya Local Government Working Unit. The research was quantitative. While, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. Moreover, the distributed to respondents. Furthermore, there were 100 respondents as sample, who taken from 26 Local Government Working Unit. Additionally, some independent variables were Accountability, Public Transparency, and Supervision. Meanwhile, the dependent variable was budget performance. For instrument testing, it used validity and reliability test. In addition, the data analysis technique used multiple linier regression with SPSS 23. The research result concluded accountability had positive effect on budget performance of Surabaya Local Government Working Uni. Likewise, public transparency had positive effect on budget performance of Surabaya Local Government Working Unit. Similarly, supervision had positive effect on budget performance of Surabaya Local Government Working Unit. In short, all hypothesis had been proven.

Keywords : accountability, public transparency, supervision, budget performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang didapat dari 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas (AK), Transparansi Publik (TP), Pengawasan (PW) dan variabel terikatnya Kinerja Anggaran (KA). Pengujian instrumen menggunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 23. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi Publik dan Pengawasan berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya. Dengan ini semua hipotesis yang dinyatakan dalam penelitian ini terbukti.

Kata Kunci : akuntabilitas, transparansi publik, pengawasan, kinerja anggaran

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang bertanggungjawab di sektor publik. Serta berhubungan langsung dengan masyarakat maupun pemerintahan. Organisasi sektor publik merupakan salah satu pemerintah daerah yang dituntut untuk bertanggungjawab memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta memberikan pembagian tugas yang baik bagi pemerintah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Otonomi daerah yang seluas-luasnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, kualitas dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah dalam hukum kenegaraannya sebenarnya dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan.

Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah tidak terlepas dari peran *Good Governance*. *Good Governance* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu keputusan yang dapat dicapai pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Baik dan tidaknya suatu pemerintahan dapat dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. Tuntutan untuk dapat mempertanggungjawabkan alokasi dana secara efektif dan efisien merupakan konsekuensi bagi pemerintah daerah. Dalam mewujudkan pertumbuhan daerah yang berjalan sesuai keinginan menjadikan pengalokasian dana yang sebaik-baiknya. Terbentuknya suatu anggaran yang baik tidak terlepas dari memperhatikan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan yang baik, juga diperlukan dalam sebuah kinerja anggaran. Masyarakat menuntut lembaga publik agar dikelola secara akuntabel, transparan, dan juga bertanggung jawab. Dalam pengelolaan anggaran, akuntabilitas, transparansi dan pengawasan sangat penting dilakukan karena hasil akhir pengelolaan tersebut harus diberikan secara terbuka kepada publik serta dipertanggungjawabkan. Adanya beberapa kasus pengelolaan anggaran yang kurang baik, menandakan bahwa dalam pelaksanaan penganggaran di sektor publik harus didasarkan pada pelaksanaan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan internal. Pengukuran kinerja adalah proses yang berurutan guna memberikan penilaian apakah rencana program atau kegiatan telah dilaksanakan dengan sesuai, dan telah berhasil memenuhi target yang sebelumnya telah ditentukan saat perencanaan. Pengukuran kinerja diawali dengan menetapkan indikator kinerja guna menyediakan informasi yang memungkinkan unit kerja dalam memantau kinerjanya dalam mencapai output dan outcome terhadap masyarakat. Bagi para pengambil keputusan, pengukuran kinerja memberi manfaat dalam memantau dan melakukan perbaikan kinerja serta tetap fokus pada tujuan organisasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas akuntabilitas (Anugriani, 2013).

Menurut Asrini (2017) Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Peran akuntabilitas sangat penting dalam organisasi, karena untuk dikatakan akuntabel organisasi harus memiliki kemampuan yang bisa menjelaskan kondisi dialami pemerintah dan didalamnya keputusan yang diambil dengan berbagai aktivitas yang dilakukan. Terciptanya pelayanan publik yang baik, pemerintah tentunya harus melakukannya secara transparansi dan akuntabilitas. Transparansi juga diperlukan oleh masyarakat, karena transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas, informasi yang bisa diakses oleh orang-orang yang berkepentingan dan informasi tersebut harus memadai dan dapat dimengerti oleh orang-orang yang membutuhkan informasi. Dalam kinerja anggaran peran transparansi sangatlah diperlukan oleh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan yang didapatkan oleh negara tersebut. Pengawasan keuangan daerah ini terdapat dalam Peraturan Pemerintahan No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Secara garis besar peraturan ini menyebutkan bahwa proses pengendalian internal meliputi proses audit, *review*, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan adanya prinsip akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unit kerja pemerintah yang mendapat perincian dari publik terpaut dengan pelaksanaan anggaran. SKPD dituntut agar meningkatkan pelayanan publik digambarkan dengan *Value for Money* dalam melangsungkan kegiatannya. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *Value for Money* dikarenakan masih banyak anggaran yang belum maksimal dilakukan secara ekonomi yaitu biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran yang digunakan tidak berdasar pada kebutuhan sesuai skala prioritas dan anggaran yang boros. SKPD sebaiknya dapat memperbaiki hal-hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak berpedoman pada *Value for Money*. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya *Value for Money* dalam meningkatkan kinerja anggaran karena dengan adanya *Value for Money* dapat mempengaruhi akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan yang terjadi pada pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pemerintah daerah pun akan lebih baik dalam melaksanakan seluruh program yang sudah direncanakan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: (1)Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja anggaran?, (2)Apakah transparansi publik berpengaruh terhadap kinerja anggaran?, (3)Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja anggaran, (2) Untuk mengetahui pengaruh transparansi publik terhadap kinerja anggaran, (3) Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntabilitas

Mardiasmo (2006:3) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Transparansi Publik

Transparansi merupakan salah satu komponen dalam *good governance*. Dalam penyelenggaraannya pemerintah mampu membuat kebijakan informasi pemerintahan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Arus informasi yang bebas, seluruh informasi, proses pemerintahan, dan lembaga lembaga yang terkait yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengawasan

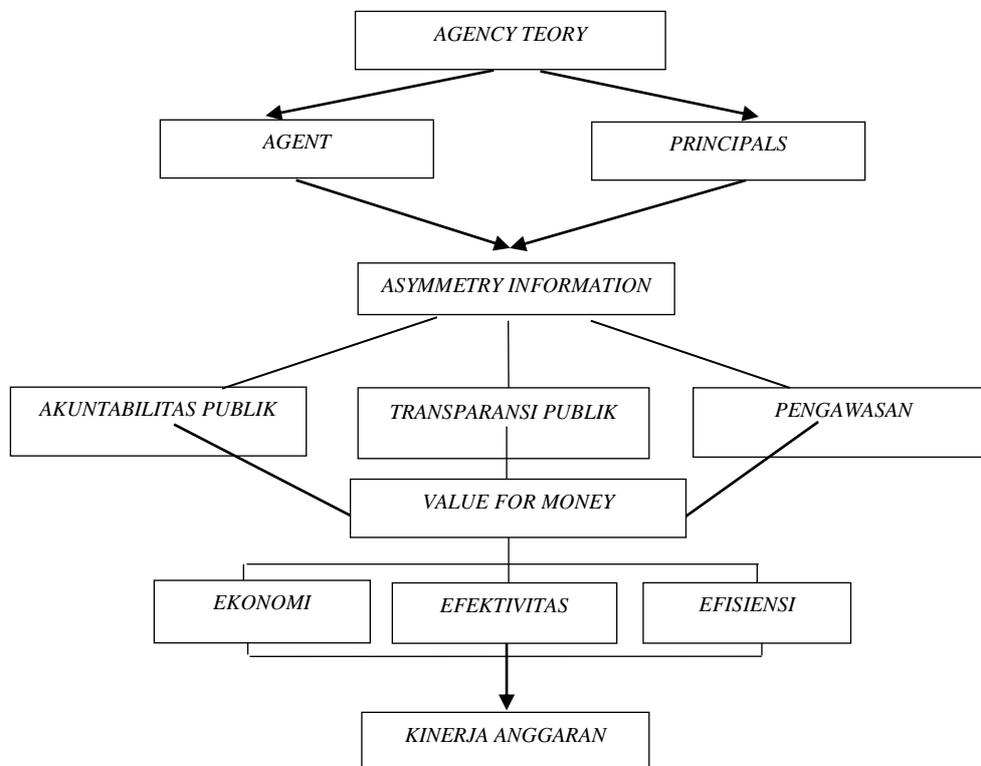
Halim (2002) mengatakan bahwa pengawasan adalah seluruh kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang sudah ditetapkan.

Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran adalah *performance budgeting* penilaian dan pengukuran suatu biaya anggaran yang digunakan untuk memproduksi dan/atau mengembangkan suatu produk atau jasa; penilaian dan pengukurannya dilakukan dengan cara mengelompokkan rekening anggaran ke dalam suatu kategori yang berkaitan dengan produk atau jasa tersebut.

Rerangka Pemikiran

Hasil Rerangka Pemikiran pada penelitian yang berjudul pengaruh akuntabilitas, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja anggaran (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota surabaya), dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran

Akuntabilitas bertanggungjawab sebagai pihak yang memberikan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan secara bertanggung jawab kepada pemegang amanah. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah (Mahmud, 2013). Akuntabilitas publik mewajibkan pemerintah untuk memberikan tanggungjawab yang horizontal bukan hanya vertikal. Untuk terciptanya pemerintahan yang baik pemerintah daerah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan anggaran daerah kepada masyarakat secara efisien dan efisien. Hasil penelitian Setiyanningrum (2017) dalam menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Nurchasanah (2018) juga menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial.

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kinerja Anggaran

Prinsip transparansi memiliki 2 konsep yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keberhasilan kebijakan dalam menyusun suatu anggaran pemerintah adalah pelaksanaan anggaran yang transparan, semakin terbuka suatu

anggaran pemerintah di masyarakat maka dapat dikatakan pemerintahan itu berhasil dalam membuat suatu kebijakan. Transparansi dalam anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah korupsi, sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat/publik dan dapat menciptakan iklim investasi yang baik serta dapat meningkatkan kepastian usaha (Andrianto, 2007). Hasil penelitian dari Setiyanningrum (2017) dalam menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Safitri (2019) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

H₂ : transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran

Pengawasan adalah pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai dengan aturan, ketentuan, dan rencana yang sudah ditetapkan dan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dijalankan. Pengawasan anggaran daerah dilakukan untuk meminimalisir kebocoran anggaran daerah dengan metode pembukuan yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan berfungsi untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Jika ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan didalam penganggaran, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Deteksi penyimpangan dalam pemerintah dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu pemerintahan untuk meningkatkan kewaspadaan. Pengelolaan anggaran yang baik juga tidak terlepas dari peran pengawasan anggaran yang benar. Hasil penelitian dari Setiyanningrum (2017) dalam menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Wandari *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah di kabupaten buleleng.

H₃ : pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan atas perhitungan presentase, rata-rata (*Mean*), Chi Kuadrat, dan perhitungan statistik lainnya (Soewadji, 2012). Populasi penelitian adalah obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Obyek penelitian ini yaitu pihak internal yang bertanggungjawab atas anggaran daerah SKPD Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel merupakan cara peneliti mengambil sampel atau contoh representative dari populasi yang tersedia (Sanusi, 2011). Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri ciri khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan peneliti. Penelitian ini berjumlah 26 SKPD yang ada di Kota Surabaya dan melibatkan responden yang bertanggungjawab dengan anggaran daerah yaitu melibatkan kepala dinas/badan SKPD Kota Surabaya, Kepala bagian keuangan dinas di kantor SKPD Kota Surabaya, bendahara di kantor SKPD. Kota Surabaya dan staff keuangan SKPD Kota Surabaya. Sesuai dengan objeknya maka kriteria penentu sampel didasari oleh alasan objek tersebut merupakan pihak yang mampu terlibat dalam anggaran daerah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode survey. Survey dilakukan untuk menyebar kuisioner atau angket kepada responden yang termasuk dalam populasi penelitian. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Pengisian kuisioner yang dilakukan secara langsung oleh responden dengan memberi tanda check (✓) pada jawaban yang telah disediakan. Pengukuran indikator-indikator variabel menggunakan skala likert. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Sugiyono (2009) menyatakan bahwa skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban yang telah diisi oleh responden yaitu lima tingkat, bergerak dari angka satu sampai empat, data skala likert untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dibeti skor berikut ini: Skor 5 = Sangat setuju, Skor 4 = Setuju, Skor 3 = Netral, Skor 2 = Tidak setuju, Skor 1 = Sangat tidak setuju.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan kepada pihak yang diberikan amanah untuk menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya.

Transparansi publik

Transparansi publik adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat dan informasi dapat diakses langsung oleh pengguna. Pihak pihak eksternal yang bertanggungjawab diharapkan mampu membantu memberikan pengawasan. Kebijakan publik juga diperlukan dalam transparansi publik, kebijakan publik adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana penyusunannya melalui berbagai tahap.

Pengawasan

Pengawasan merupakan jaminan agar anggaran sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, instruksi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kadarman (2001) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada rencana untuk merancang sistem umpan balik informasi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran adalah pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran yang diberi oleh pusat dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian, karena analisis data menentukan kesimpulan yang dibuat dari penelitian tersebut. Analisis data ini menggunakan Software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga dapat membedakan besar nilai variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006).

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004:169). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan pertanyaan kuisisioner yang sesuai dengan karakter responden berkaitan tentang variabel yang akan diteliti : variabel akuntabilitas publik, transparansi publik, pengawasan dan kinerja anggaran yang disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif dalam SPSS.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Apabila suatu instrumen dalam penelitian dikatakan valid maka hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:168). Ghozali (2016:53) juga menentukan pengukuran uji validitas, yaitu: Jika r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung \leq r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas dapat dilakukan untuk mengukur jawaban responden terhadap pernyataan dalam kuisisioner tetap konsisten apabila dilakukan dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur hasil uji reabilitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut: Jika nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60 maka kuisisioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten. Sementara, jika nilai *Cronbach's Alpha* $<$ 0,60 maka kuisisioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji model regresi, variabel akuntabilitas, transparansi publik, pengawasan dan kinerja anggaran mempunyai distribusi normal atau tidak. Ghozali (2016:154) menunjukkan bahwa uji normalitas merupakan uji statistik yang digunakan untuk menguji model regresi variabel yang diteliti apakah berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan sebagai berikut: Jika probabilitas $>$ 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal. Dan jika probabilitas $<$ 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk memenuhi salah satu syarat uji asumsi klasik dalam sebuah model regresi. Model regresi yang baik adalah terbebas dari berbagai gejala asumsi klasiknya, salah satunya multikolinieritas. Memenuhi kriteria *BLUE* maka harusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Pada umumnya pengujian multikolinieritas menggunakan metode *VIF (Variance Inflation Factor)*. Ketentuan yang digunakan untuk nilai VIF adalah apabila nilai VIF $<$ 10 maka model regresi dapat disimpulkan terbebas dari asumsi multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai VIF $>$ 10 maka disimpulkan terdapat gangguan multikolinieritas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam regresi digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi regresi dalam sebuah pengamatan dari (apakah terdapat ketidak samaan varian dari residual dalam sebuah pengamatan dalam model regresi). Untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan menggunakan grafik plot atau scatterplot. Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang teratur maka dapat disimpulkan

terjadi gejala heteroskedastisitas. Apabila titik-titik dalam grafik membentuk pola yang menyebar diatas dan dibawah angka nol sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas (AK), transparansi (TP) dan pengawasan (PW) sedangkan variabel terikat atau variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja anggaran (KA). Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independennya, analisis ini dilakukan pada saat suatu penelitian terdapat minimal dua variabel independennya (Sugiyono, 2016:277). Formulasi persamaan linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KA = \alpha + \beta_1AK + \beta_2TP + \beta_3PW + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji F

Dilakukannya uji F dalam suatu penelitian yaitu untuk menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Kriteria pengujian: $P_{value} < 0,05$ menunjukkan bahwa uji kelayakan model layak dan fit untuk digunakan pada penelitian, $P_{value} > 0,05$ menunjukkan bahwa uji kelayakan model tidak layak dan fit untuk digunakan pada penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat berarti R^2 yang diperoleh mendekati satu. Sedangkan, jika R^2 mendekati nol maka semakin lemah hubungan antara keduanya. Analisis koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengukur kuat atau lemahnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen yaitu yang memiliki nilai mendekati satu (Ghozali, 2016: 95).

Uji Hipotesis

Uji t atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh disetiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2016:99). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria: (1) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. (2) Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pengisian kuisioner oleh responden terdapat pernyataan-pernyataan untuk masing-masing variabel dependen maupun variabel independen. Pernyataan yang tertulis berhubungan dengan akuntabilitas, transparansi publik, pengawasan dan kinerja anggaran. Dimana isi dari pernyataan tersebut terdapat 35 pernyataan yang terdiri dari, 9 pernyataan digunakan untuk mewakili akuntabilitas, 8

pernyataan digunakan untuk mewakili transparansi publik, 8 pernyataan digunakan untuk mewakili pengawasan, dan 10 pernyataan digunakan untuk mewakili kinerja anggaran. Setiap pernyataan tersebut mewakili variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Secara penilaian responden diminta untuk mengisi kuisioner yang telah dikirimkan oleh peneliti berdasarkan pandangan responden mengenai akuntabilitas, transparansi publik, pengawasan dan kinerja anggaran. Dimana untuk mengukur jawaban dari responden menggunakan skala likert dengan nilai 1 sampai dengan 5, dengan keterangan 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. Berikut hasil pengujian statistik deskriptif variable, sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AK	100	35	43	39.77	1.669
TP	100	32	40	36.57	1.898
PW	100	32	39	36.24	1.676
KA	100	40	48	46.19	.918
Valid (listwise)	100				

Sumber: Hasil kuisioner diolah, 2020

Hasil dari pengujian statistik deskriptif pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kualitas jawaban minimum responden sebesar 35, maksimum sebesar 43, dengan rata-rata sebesar 39,77, dan standar deviasi sebesar 1,669. Variabel transparansi publik kualitas jawaban minimum responden sebesar 32, maksimum sebesar 40, dengan rata-rata sebesar 36,57, dan standar deviasi sebesar 1,898. Variabel pengawasan kualitas jawaban minimum responden sebesar 32, maksimum sebesar 40, dengan rata-rata sebesar 36,24, dan standar deviasi sebesar 1,676. Variabel kinerja anggaran kualitas jawaban minimum sebesar 40, maksimum sebesar 48, dengan rata-rata sebesar 46,19, dan standar deviasi sebesar ,918. Sehingga nilai rata-rata akuntabilitas, transparansi publik, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur penelitian yang valid harus diukur dengan seharusnya apabila r hitung $>$ r tabel maka pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika r hitung $<$ r tabel maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Sig	Keterangan
1.	Akuntabilitas	X1	0,421	0,196	0,000	Valid
		X2	0,552	0,196	0,000	Valid
		X3	0,601	0,196	0,000	Valid
		X4	0,626	0,196	0,000	Valid
		X5	0,522	0,196	0,000	Valid
		X6	0,645	0,196	0,000	Valid
		X7	0,756	0,196	0,000	Valid
		X8	0,686	0,196	0,000	Valid

		X9	0,620	0,196	0,000	Valid
		X1	0,774	0,196	0,000	Valid
		X2	0,552	0,196	0,000	Valid
		X3	0,668	0,196	0,000	Valid
2.	Transparansi Publik	X4	0,365	0,196	0,000	Valid
		X5	0,552	0,196	0,000	Valid
		X6	0,818	0,196	0,000	Valid
		X7	0,843	0,196	0,000	Valid
		X8	0,838	0,196	0,000	Valid
		X1	0,598	0,196	0,000	Valid
		X2	0,662	0,196	0,000	Valid
		X3	0,698	0,196	0,000	Valid
3.	Pengawasan	X4	0,671	0,196	0,000	Valid
		X5	0,707	0,196	0,000	Valid
		X6	0,671	0,196	0,000	Valid
		X7	0,769	0,196	0,000	Valid
		X8	0,755	0,196	0,000	Valid
		Y1	0,925	0,196	0,000	Valid
		Y2	0,928	0,196	0,000	Valid
		Y3	0,939	0,196	0,000	Valid
		Y4	0,945	0,196	0,000	Valid
4.	Kinerja Anggaran	Y5	0,930	0,196	0,000	Valid
		Y6	0,976	0,196	0,000	Valid
		Y7	0,966	0,196	0,000	Valid
		Y8	0,939	0,196	0,000	Valid
		Y9	0,895	0,196	0,000	Valid
		Y10	0,916	0,196	0,000	Valid

Sumber: Hasil kuisioner, diolah 2020

Kesimpulan pada Tabel 2 keseluruhan item pernyataan dari masing masing variabel dapat dikatakan valid karena mempunyai r hitung $>$ r tabel (r hitung $>$ 0,196).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur jawaban responden terhadap pertanyaan dalam kuisioner tetap konsisten apabila dilakukan dua atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur hasil uji reabilitas. Berikut ini tabel uji reliabilitas dari variabel dependen dan variabel independen.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Model	Cronbach's	N of Item
	Alpha	
AK	0,781	9
TP	0,823	8
PW	0,847	8
KA	0,984	10

Sumber: Hasil kuisioner, diolah 2020

Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas dari variabel akuntabilitas dan hasil dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,781. Variabel transparansi publik dan hasil dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,823. Variabel pengawasan dan hasil dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,847. Variabel kinerja anggaran dan hasil dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,984.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

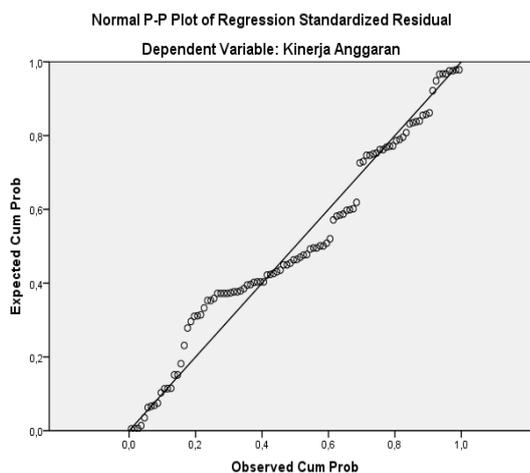
Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel yang diteliti apakah berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov. Berikut hasil uji statistik non parametrik *Kolmogorov-smirnov* pada Tabel 4:

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Non-Parametrik Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-smirnov	1,207
Asymp. Sig	0,108

Sumber: Hasil kuisisioner, diolah 2020

Pada Tabel 4 diketahui hasil *Kolmogorov-smirnov* adalah 1,207 dan signifikan dengan $0,108 > \alpha$ (nilai $\alpha = 0,05$). Jadi dapat disimpulkan bahwa data distribusi pengujian normalitas berdistribusi normal dan layak. Berikut ini kriteria grafik pada normal *probability plot of regression standardized residual*: Jika data yang diuji menyebar disekitar garis diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas, dan Jika data yang diuji tidak menyebar atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Gambar 2:



Gambar 2
Grafik Uji Normalitas Data
Sumber: Hasil kuisisioner, diolah 2020

Gambar grafik diatas menjelaskan bahwa terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi. Uji multikolinearitas umumnya menggunakan metode VIF (*Variance Inflation Factor*). Dibawah ini hasil pengujian multikolinearitas dilihat pada Tabel 5:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

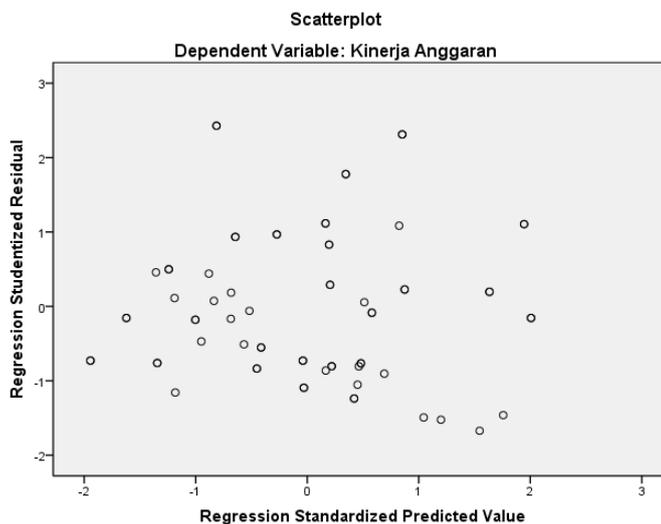
Model	Coefficient ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
AK	0,942	1,062
TP	0,974	1,027
PW	0,961	1,041

Sumber: Hasil kuisisioner, diolah 2020

Dari tabel diatas hasil perhitungan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mempunyai nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam regresi penelitian ini dan dapat dikatakan model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedasitas

Uji heteroskedasitas digunakan untuk menguji model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Berikut ini hasil uji heteroskedasitas dengan melihat Gambar 3:



Gambar 3
Grafik Uji Heteroskedasitas
Sumber: Hasil kuisisioner, diolah 2020

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa titik titik menyebar secara acak serta tersebar di bawah maupun di atas angka 0 pada sumbu Y, jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh akuntabilitas, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja anggaran. Persamaan linier berganda diperoleh dari data yang diolah menggunakan bantuan komputer program SPSS dan dapat dilihat pada Tabel 6:

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	37,973	3,338		11,337	0,000
	AK	0,100	0,056	0,182	2,783	0,018
	TP	0,053	0,048	0,110	2,098	0,035
	PW	0,063	0,055	1,116	2,148	0,029

a. Dependent Variable: KA

Sumber: Hasil kuisisioner, diolah 2020

Pada tabel diatas dapat ditentukan persamaan linier berganda yaitu:

$$KA = 37,973 + 0,100 AK + 0,053 TP + 0,063 PW + e.$$

Persamaan regresi yang dapat menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi publik dan pengawasan mempunyai nilai koefisien positif . Jadi penjelasan persamaan diatas: (1) Apabila akuntabilitas semakin jelas dan baik maka kinerja anggaran akan semakin meningkat, sebaliknya jika akuntabilitas buruk maka kinerja anggaran akan semakin menurun. (2) Apabila transparansi publik semakin jelas dan baik maka kinerja anggaran akan semakin meningkat, sebaliknya jika transparansi publik buruk maka kinerja anggaran akan semakin menurun. (3) Apabila pengawasan semakin jelas dan baik maka kinerja anggaran akan semakin meningkat, sebaliknya jika pengawasan buruk maka kinerja anggaran akan semakin menurun.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dibawah ini hasil pengujian koefisien determinasi (R²) dapat dilihat pada Tabel 7:

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,648	0,461	0,332	0,903

a. Predictors: (Constant), AK, TP, PW

b. Dependent Variable: KA

Sumber: Hasil kuisisioner, diolah 2020

Berdasarkan Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,461 menunjukkan bahwa kinerja anggaran dipengaruhi oleh variabel independen akuntabilitas, transparansi publik dan pengawasan. Sedangkan sisanya sebesar 53,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam model penelitian. Dilihat dari nilai R² yang mendekati angka 1 berarti independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah layak atau tidak. Dibawah ini hasil uji f dilihat pada Tabel 8:

Tabel 8
Hasil F
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,128	3	1,709	3,097	,003 ^a
	Residual	78,262	96	0,815		
	Total	83,390	99			

a. Predictors: (Constant), AK, TP, PW

b. Dependent Variable: KA

Sumber: Hasil kuisisioner, diolah 2020

Hasil dari Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 3,097 dengan tingkat signifikansi 0,003 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan dalam penelitian. Artinya model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh disetiap variabel akuntabilitas, transparansi publik dan pengawasan secara individu terhadap variabel kinerja anggaran. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0.05 ($\alpha = 5\%$) atau tingkat keyakinan sebesar 0,95. Dibawah ini hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 9:

Tabel 9
Hasil Uji t

		Coefficients ^a	
Model		Standardized Coefficients	
		Coefficient B	Sig
1	(Constant)	11,337	0,000
	AK	2,783	0,018
	TP	2,098	0,035
	PW	2,148	0,029

a. Dependent Variable: KA

Sumber: Hasil kuisisioner, diolah 2020

Dari tabel diatas hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut: (1) Pengujian hipotesis akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$, maka hipotesis pertama (H_1) diterima. (2) Pengujian hipotesis transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$, maka hipotesis kedua (H_2) diterima. (3) Pengujian hipotesis pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, dibuktikan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$, maka hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel akuntabilitas terhadap variabel terikat kinerja anggaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,461 dan hasil uji statistik t hitung lebih besar dari t tabel ($2,783 > 1,984$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$.

Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 yang menyatakan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dengan kinerja anggaran yang memiliki arti apabila kinerja anggaran pemerintah daerah berjalan dengan baik dalam organisasi pemerintah tersebut. Seseorang yang memiliki sifat akuntabilitas yang tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi semakin baik, dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan anggaran perlu adanya peran akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi maka tanggung jawabnya akan semakin besar pula. Akuntabilitas yang baik disebabkan karena adanya organisasi pemerintah yang menjalankan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengukuran kinerja berdasarkan alokasi biaya dan pelayanan yang menekankan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sehingga dapat menimbulkan kinerja anggaran yang sesuai dengan tujuan organisasi pemerintah tersebut. Jadi pemerintah Kota Surabaya harus tetap meningkatkan dan mempertahankan prinsip akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu prinsip pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja anggaran agar menjadikan pemerintah lebih baik lagi. Pelaksanaan anggaran tidak cukup hanya melihat besar kecilnya anggaran yang merupakan masukan, tapi juga harus memperhatikan kinerja anggaran tersebut yang meliputi pencapaian kinerja, keluaran, hasil dan manfaat serta tepat tidaknya sasaran kegiatan yang dibiayai anggaran. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomi, efisien dan efektif.

Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kinerja Anggaran

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel transparansi publik terhadap kinerja anggaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji nilai hasil uji koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,461 dan hasil uji statistik t hitung lebih besar dari t tabel ($2,098 > 1,984$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_2 yang menyatakan transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran yang memiliki arti apabila kinerja anggaran tersebut baik itu dipengaruhi oleh transparansi anggaran yang baik maupun dalam organisasi pemerintah tersebut. Kebijakan dalam penyusunan anggaran dibuat oleh pemerintah untuk menentukan keberhasilan anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik. Prinsip transparansi memiliki dua aspek yaitu, komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yang baik disebabkan oleh adanya komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan publik dengan cara selalu mengomunikasikan melalui media massa secara terbuka dan hak masyarakat terhadap akses informasi seperti informasi yang cukup diberikan kepada publik tentang prosedur dan tanggung jawab organisasi yang sesuai tujuan organisasi. Tugas transparansi bukan hanya sekedar keterbukaan dalam menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel pengawasan terhadap kinerja anggaran. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji nilai hasil uji koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,461 dan hasil uji statistik t hitung lebih besar dari t tabel ($2,148 > 1,984$) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan pengawasan berpengaruh positif

terhadap kinerja anggaran dapat diterima. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran yang memiliki arti apabila kinerja anggaran tersebut baik itu dipengaruhi oleh pengawasan yang baik maupun dalam organisasi pemerintah tersebut. Pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk mengamati apa yang terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan didalam penganggaran, maka hambatan itu diharapkan mampu dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dapat tercapai dengan maksimal. Pengawasan yang baik disebabkan karena adanya tindakan koreksi yang dilakukan karena adanya penyimpangan dan hambatan dalam kinerja anggaran seperti, pengawasan yang dilakukan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah di SKPD Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dengan menggunakan beberapa uji yang telah dilakukan pada halaman sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran bahwa semakin tinggi dan kuat akuntabilitas maka akan semakin berpengaruh baik terhadap hasil kinerja anggaran pemerintah daerah di SKPD Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan akuntabilitas yang tinggi sangat menunjang kinerja anggaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. (2) Hasil penelitian menunjukkan transparansi publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran bahwa semakin tinggi dan kuat transparansi publik maka semakin berpengaruh baik terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah di SKPD Kota Surabaya. Hal ini menunjukkan jika transparansi tinggi maka kinerja anggaran yang dihasilkan juga dapat baik sehingga dapat meningkatkan kinerja di dalam instansi tersebut. (3) Hasil penelitian menunjukkan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran bahwa semakin tinggi dan kuat pengawasan maka semakin berpengaruh baik terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah di SKPD Kota Surabaya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan dalam setiap SKPD membantu unit-unit kerja untuk memperhatikan kinerja anggaran yang baik.

Saran

Pada hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti, antara lain: (1) Bagi pemerintahan daerah agar dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi publik, dan pengawasan sehingga pemerintahan yang baik dapat terlaksana terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan harus cepat tanggap dalam menjalankan setiap keluhan publik atau masyarakat. (2) Teknik pengumpulan data menggunakan penyebaran kuisioner secara langsung, diharapkan peneliti selanjutnya hendaknya menggunakan metode pengumpulan data wawancara sehingga informasi yang didapat lebih akurat dan lengkap. (3) Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kinerja anggaran instansi pemerintah daerah, serta dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian agar data yang dihasilkan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M. F. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi* 11(2).
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. E-Government. Bayumedia Publisng. Malang.
- Anugriani, R. M. 2013. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bone. *Skripsi*. Universitas Hasanudin: Makasar.
- Arifani, C., A. Salle dan A. Rante. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 13(1): 68-82.
- Arista, A. S. A. N. dan I. W. Suartana. 2016. Pemahaman Atas SAP Sebagai Pemoderasi Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi pada Kinerja Anggaran SKPD Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi* 17(2): 1667-1699.
- Asrini. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Skpd Di Pemerintah Daerah Kota Palu. *Jurnal Katalogis*. Universitas Tadolaka 5(1).
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi ketiga. Erlangga. Yogyakarta.
- Firdiansyah, M. A. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana 11(2).
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Hanafiah, R. R., S. Abdullah dan M. Saputra. 2016. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Di SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah* 5(4): 77-86.
- Hehanussa, J. S. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Jurnal Akuntansi Ekonomi* 2(1):82-90.
- Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Prenhallindo. Jakarta.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Nurchasanah, P. S. 2018. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntansi* 7(8).
- Premananda, N. P. U. 2016. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Kota Denpasar. *Skripsi*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Rigian, D. dan R. P. Sari. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money. *Jurnal Bisnis dan Sistem Informasi* 1(1):38-47.
- Safitri, D. D. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran. *Jurnal Akuntansi* 8(3).
- Sanusi, A. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.

- Setiyanningrum, I. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta, *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Peneletian*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 2003. Republik Indonesia. Jakarta.
- _____ Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. 2004. Republik Indonesia. Jakarta.
- _____ Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. Jakarta.
- Wandari, I. D. N. T., E. Sudjana dan M. P. Adi. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu dan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi* 3(1): 1-12.